



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA, DAN JARINGAN KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GREGORIUS SETYADHI BUDHI DHARMAWAN
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 822153

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

2.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/120 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 1200 m² di KAB / KOTA BELITUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/45 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m²/90 m² di KAB / KOTA BELITUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 600 m² di KAB / KOTA BELITUNG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
6. Tanah Seluas 2796 m² di KAB / KOTA BELITUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 530 m²/120 m² di KAB / KOTA BELITUNG, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
8. Tanah Seluas 2028 m² di KAB / KOTA BELITUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah Seluas 1272 m² di KAB / KOTA BELITUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
10. Tanah Seluas 7830 m² di KAB / KOTA BELITUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

100.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TAFT HILINE Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.



100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	400.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.200.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.200.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.